

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

Dalam teori agensi, sering terjadi konflik dikarenakan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham bertentangan. Permasalahan ini kemudian dikenal sebagai masalah keagenan atau *agency problem* (Krisnauli, 2014). Permasalahan ini timbul dikarenakan manajer berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Hal tersebut akan menambah *cost* bagi perusahaan. *Cost* yang timbul akibat konflik tersebut disebut *agency cost* (Manalu & Natalia, 2015). Semakin tinggi *cost* yang timbul akibat konflik tersebut, maka akan menyebabkan semakin turunnya keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham.

Menurut Brigham, Eugene, & Gapenski (2006) terdapat beberapa konflik keagenan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu antara manajer dengan pemilik saham (*shareholders*). Yang kedua adalah antara manajer dan *debtholders*. Yang terakhir yaitu antara manajer dengan *shareholders* dan *debtholders*. Salah satu contoh masalah keagenan yaitu ketika *shareholders* menginginkan agar *cost* perusahaan dibiayai menggunakan utang. Namun manajer tidak menyetujui hal tersebut dikarenakan utang memiliki resiko yang lebih besar.

Untuk bisa memahami *corporate governance*, maka perlu untuk memahami hubungan keagenan. Hal ini dikarenakan hubungan keagenan menjadi dasar untuk memahami *corporate governance*. Jensen & Meckling (1976)

mengemukakan bahwa inti dari hubungan keagenan adalah kontrak yang disepakati antara manajer sebagai *agent* dan investor sebagai *principal*. Permasalahan terjadi ketika *agent* bertindak berlawanan dengan keinginan *principal* yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya biaya keagenan.

Fokus teori agensi yaitu untuk mendapatkan kontrak paling efisien. Kontrak ini bertujuan untuk memotivasi agen, dan kontrak ini nantinya yang akan menjadi dasar hubungan antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, unit analisis pada teori agensi yaitu pada kontrak yang menjadi dasar hubungan *principal* dengan *agent*.

Dalam hubungan keagenan, pemegang saham atau *principal* melimpahkan wewenang kepada *agent* dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal* (Pujiastuti, 2008). Namun, manajer sebagai *agent* memiliki dorongan untuk memaksimalkan kesejahterannya sendiri. Salah satunya dengan melakukan manajemen laba atau *earnings management* (Yushita, 2010). Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab timbulnya *agency problem*. Untuk meminimalisir *agency problem* tersebut, maka diterapkan sistem *corporate governance* karena *corporate governance* dianggap mampu melindungi kepentingan pemegang saham (Krisnauli, 2014).

Sebagai contoh *agency problem* yaitu manajer tidak secara serius berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Contoh yang lain yaitu manajer menentukan gaji sangat besar untuk diri sendiri, dan juga memperbanyak fasilitas bagi para eksekutif. Hal ini tentunya akan menambah *cost* bagi para

pemegang saham. Permasalahan tersebut dapat memicu timbulnya *agency problem*. Contoh lain dimana *agency problem* bisa terjadi yaitu masalah terkait *leveraged buyout*, yaitu ketika manajemen melakukan perjanjian kredit, kemudian menawarkan kepada para investor agar mau membeli saham dimana saham tersebut belum dimiliki (*tender-offer*). Kemudian setelah semua saham yang beredar dibeli, hak milik atas perusahaan tersebut diambil alih.

## **2. Corporate Governance**

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* atau merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan yang timbul akibat masalah keagenan. *Corporate governance* pada intinya terkait siapa yang harus melakukan pengendalian terkait operasional perusahaan dan mengapa harus dilakukan pengendalian. Yang dimaksud siapa disini adalah para investor. Sedangkan yang dimaksud mengapa yaitu karena terdapat hubungan antara investor dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Bernhart & Rosenstein dalam Rupilu (2011), menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme *corporate governance*. Mekanisme pertama yaitu mekanisme internal, seperti struktur dewan komisaris. Mekanisme kedua yaitu mekanisme eksternal seperti pasar yang berfungsi sebagai kontrol untuk perusahaan. Kedua mekanisme tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan yang terjadi pada perusahaan.

Peningkatan kepemilikan manajerial juga dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi *agency problem* yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris, pengawasan laporan keuangan oleh komite audit, pengawasan audit eksternal, dan pengawasan sistem pengendalian internal juga diharapkan dapat mengurangi sifat mengutamakan kepentingan sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga masalah keagenan dapat dikurangi.

#### **a. Kepemilikan Manajerial**

Sujono & Soebiantoro dalam Erida (2011) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai jumlah saham (dalam persentase) yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) terdiri dari para investor yang mempunyai kedudukan pada manajemen perusahaan. Kedudukan pada manajemen perusahaan yang dimaksud yaitu sebagai dewan komisaris maupun sebagai kreditur. Dengan adanya kepemilikan saham ini diharapkan dapat menimbulkan mekanisme pengawasan terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang efektif untuk meminimalisasi *agency problem*. Hal ini dikarenakan manajer merasa ikut memiliki perusahaan sehingga manajer cenderung menyelaraskan kepentingan dirinya dengan kepentingan pemegang saham, dimana dirinya termasuk ke dalam investor. Kepemilikan proporsi saham yang semakin tinggi oleh manajer akan menyebabkan manajer semakin serius untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham.

## **b. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan struktur kepemilikan saham dimana mayoritas saham dalam perusahaan dikuasai oleh suatu institusi atau lembaga (Gumilang dkk, 2015). Institusi dalam hal ini dapat berupa perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan institusi lainnya. Proporsi kepemilikan institusional didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dibandingkan jumlah saham perusahaan secara keseluruhan yang dinyatakan dalam presentase (Boediono, 2005).

Kepemilikan institusional adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Alasannya adalah karena pihak institusi sebagai pemegang saham mayoritas dikarenakan mempunyai sumber daya yang paling besar jika dibandingkan para pemegang saham yang lain (Nisa, 2017). Dengan presentase kepemilikan saham yang besar, maka tingkat kekuasaan yang dimiliki juga besar. Oleh karena itu, pihak institusi diharapkan dapat mengawasi kinerja manajerial secara lebih optimal. Mekanisme pengawasan yang baik akan dapat lebih menjamin kepentingan pemegang saham.

## **c. Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan direksi, pemegang saham, dan dewan komisaris lainnya, baik itu hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan, maupun hubungan keluarga, dimana hubungan ini dikhawatirkan akan mengurangi integritasnya untuk melakukan tindakan secara independen (Krisnauli, 2014).

Kepentingan investor dapat lebih terlindungi karena dewan komisaris independen akan bersikap netral terhadap semua tindakan manajerial. Menurut Ujijantho & Pramuka (2007), jumlah anggota dewan komisaris independen didasarkan pada jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dinyatakan dalam presentase.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*. Dalam sistem ini, peran dewan direksi dan dewan komisari dipisah. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pada kinerja manajemen. Di sisi lain, dewan direksi mempunyai tugas untuk melakukan operasionalisasi perusahaan (Wardhani, 2007). Oleh karena itu, dewan direksi memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan strategi perusahaan.

Dewan komisaris memiliki beberapa fungsi. Pertama yaitu untuk mengawasi direksi terkait kebijakan dan pelaksanaan perusahaan. Kedua yaitu memberikan saran kepada direksi terkait kebijakan dan pelaksanaan perusahaan. Untuk dapat menjalankan kedua fungsi tersebut, maka anggota dewan komisaris harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama yaitu seorang yang memiliki karakter yang baik. Kedua yaitu memiliki pengalaman yang relevan terkait dengan tugas yang akan dijalankannya.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan

komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Komite nasional kebijakan *corporate governance* menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- 5) Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 6) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- 7) Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

#### **d. Ukuran Dewan Direksi**

Dewan direksi pada suatu perusahaan mempunyai peran penting untuk menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh dewan direksi dalam mengelola perusahaan akan sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan direksi memiliki wewenang penuh dalam operasional perusahaan (Krisnauli, 2014). Sedangkan jumlah anggota dewan direksi ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan (Rimardhani dkk, 2016). Menurut Solihin (2009), dalam fungsinya sebagai pengelola perusahaan, dewan direksi memiliki tugas utama sebagai berikut:

- 1) **Kepengurusan.** Dalam hal kepengurusan, dewan direksi bertugas untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang, serta visi dan misi perusahaan.
- 2) **Manajemen risiko.** Dalam hal manajemen resiko, dewan direksi betugas untuk menyusun dan melaksanakan sistem manajemen resiko perusahaan.
- 3) **Pengendalian internal,** dalam hal ini tugas dewan direksi yaitu menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) **Komunikasi,** dimana tugas dewan direksi yaitu memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan agar komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan lancar.

- 5) Tanggung jawab sosial, dimana dewan direksi bertugas untuk membuat laporan rencana yang jelas terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara tertulis.

### **3. Profitabilitas**

Profitabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut dijadikan dasar pembagian dividen perusahaan (Suharli, 2010), baik dividen dalam bentuk tunai atau dividen dalam bentuk saham. Laba suatu perusahaan dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagi (sebagai dividen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi, yaitu salah satunya adalah dividen, dipengaruhi oleh besar kecilnya laba bersih suatu perusahaan. Meningkatnya laba bersih perusahaan akan mendorong terjadinya peningkatan pada dividen yang diterima (Arihaha, 2009).

Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan bisa dilakukan melalui beberapa *proxy*, antara lain jumlah laba bersih, laba operasi, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ditunjukkan melalui rasio profitabilitas (Ang, 1997). Menurut Arihaha (2009) penetapan besar kecilnya pembayaran dividen mencerminkan kualitas atas stabilitas keuntungan suatu perusahaan. Suharli (2005) mengukur profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan rasio investasi. Salah satu tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba.

Kebijakan investor dalam melakukan investasi salah satunya dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan karena rasio profitabilitas adalah dasar yang digunakan investor untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan ditunjukkan dengan rasio profitabilitas yang dinilai dari tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **a. Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas**

Tujuan dalam menjalankan usaha adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Untuk itu, salah satu cara yang diyakini bisa mempengaruhinya adalah melalui struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) yang ada pada *corporate governance* (Senda, 2013). Ketika bagian manajemen suatu perusahaan mempunyai penyertaan saham pada perusahaan dimana mereka bekerja, hal ini akan menimbulkan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang mereka ambil.

Kepemilikan manajerial biasa diartikan sebagai besar kecilnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan dan direktur perusahaan pada tiap akhir tahun. Adanya Kepemilikan saham oleh manajer perusahaan bertujuan supaya manajer perusahaan bertindak sesuai dengan ekpektasi pemegang saham dalam memaksimalkan laba.

Ketika manajer memiliki penyertaan saham pada perusahaan, diduga mereka akan termotivasi untuk berkinerja baik karena akan mendapatkan keuntungan dari saham yang dimilikinya. Perusahaan yang menerapkan

kepemilikan manajerial yang relatif rendah akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba yang dilaporkan, meskipun hal tersebut tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan (Boediono, 2005).

Hasil studi oleh Rupilu (2011) menunjukkan kepemilikan manajerial mempengaruhi laba perusahaan. Hasil penelitian Wicaksono (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi laba perusahaan secara positif.

Hasil penelitian Rimardhani, dkk., (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi laba perusahaan secara positif. Hasil penelitian Dharmastuti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi laba perusahaan secara positif. Fenomena ini bisa terjadi ketika manajer mempunyai persentase kepemilikan saham pada perusahaan, maka akan berperilaku layaknya investor pada umumnya dan bisa memberikan kepastian bahwalaporan ekuangan perusahaandisajikan secara wajar dan mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan (Kouki *et al.*, 2011). Laba pada organisasi bisa menurun apabila jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen meningkat (Yang *et al.* 2008).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas**

## **b. Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas**

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan dalam memberikan fungsi pengendalian bagi pihak manajemen melalui aktivitas monitoring yang efektif sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan manajemen yang bisa merugikan organisasi atau perusahaan. Keleluasaan dan kemampuan yang dimiliki oleh investor institusional dalam memonitor kegiatan yang dilakukan oleh manajemen akan berpengaruh positif bagi organisasi atau perusahaan karena tindakan yang menyimpang dari para manajer bisa diminimalisir dan bisa meningkatkan laba perusahaan secara maksimal.

Investor bisa melikuidasi saham yang dimilikinya ketika terjadi perubahan laba pada perusahaan yang dirasakan perubahan tersebut tidak menguntungkan baginya. Ketika hal tersebut terjadi dimana investor institusional memiliki saham yang besar, maka hal tersebut bisa memberikan pengaruh pada nilai saham perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan dapat melakukan *earnings management* untuk menghindari tindakan likuidasi yang dilakukan investor. Kepemilikan institusional diyakini berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas organisasi atau perusahaan. Tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan bisa dipengaruhi salah satunya oleh kepemilikan institusional. Karena sumber daya yang cukup besar yang dimiliki oleh institusi, mereka mampu menjadi pemegang saham besar pada perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, pihak institusi cenderung lebih memiliki untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki kontrol yang ketat dengan jumlah deviden yang tinggi.

Hasil penelitian Rupilu (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi laba perusahaan secara positif. Hal serupa diungkapkan oleh Wicaksono (2014) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa laba perusahaan secara positif dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Hasil penelitian Rimardhani, dkk., (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi laba perusahaan secara positif. Hasil penelitian Dharmastuti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi laba perusahaan secara positif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis kedua adalah:

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas**

### **c. Proporsi dewan komisaris independen dan profitabilitas**

Dalam dewan komisaris secara keseluruhan terdapat bagian yang disebut dewan komisaris independen yang memiliki tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Selain tugas tersebut, komisaris independen juga bisa berperan sebagai peralai ketika ada masalah atau perselisihan yang terjadi antara pihak manajer internal organisasi atau perusahaan dan bisa memberikan pengawasan terhadap kebijakan direksi serta memberikan saran atau nasihat kepada direksi. Penelitian oleh Subhan (dalam Wulandari, 2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi komposisi komisaris independen, maka akan memberikan dampak pada penurunan profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komisaris independen mampu menurunkan tingkat pelanggaran manajemen, selain itu mampu memberikan nilai tambah bagi pihak

yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Hal ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh Nurika (2011) yang menyatakan bahwa laba perusahaan tidak diengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap laba masih belum konsisten.

Adanya pengawasan yang efektif dari komisaris independen, maka akan mengurangi laba dan lebih fokus untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan, untuk melindungi pemegang saham, perusahaan seharusnya memiliki dewan komisaris dan dibantu oleh komisaris independen. Proporsi komisaris independen dalam suatu organisasi harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan bergantung pada kinerja dewan direksi.

Hasil penelitian Rupilu (2011) menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen mempengaruhi laba perusahaan secara negatif. Hasil penelitian lain oleh Wicaksono (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi laba perusahaan secara negatif. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Rimardhani, dkk., (2016) melaporkan bahwa besar kecilnya jumlah dewan komisaris independen mempengaruhi keuntungan perusahaan secara negatif. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Dharmastuti (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan secara negatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga adalah:

### **H<sub>3</sub>: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas**

#### **d. Ukuran Dewan Direksi dan Profitabilitas**

Dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dewan direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang penting. Besar kecilnya jumlah dewan direksi diduga menjadi salah satu *part* dari *corporate governance* yang memiliki fungsi penting dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan laba. Dewan direksi dalam sebuah perusahaan dimaksudkan sebagai alat pengendali internal utama yang bertugas memonitor perilaku manajer perusahaan (Subhan, 2011). Permasalahan antara pihak *principal* dan agen bisa muncul akibat kebutuhan terhadap jumlah dewan direksi. Hal ini dikarenakan jumlah dewan direksi yang tinggi atau terlalu banyak akan sulit dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan akan lebih sulit dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang besar dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan yang mempunyai jumlah dewan direksi yang lebih kecil (Wardhani, 2007). Jumlah direksi yang banyak mampu menyebabkan fungsi pengawasan kurang efektif dan bisa menaikkan profitabilitas oleh manajemen (Purwandari, 2011).

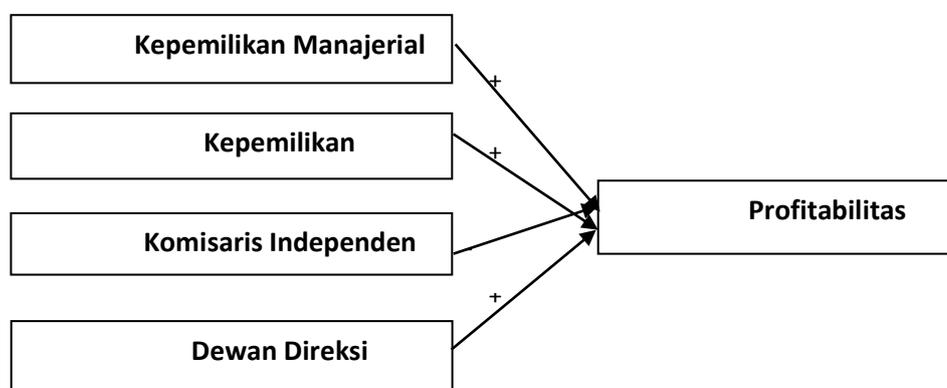
Hasil penelitian Rupilu (2011) menunjukkan bahwa besar kecilnya dewan direksi mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara positif. Selain itu, hasil studi oleh Wicaksono (2014) melaporkan bahwa proporsi dewan direksi mempengaruhi laba perusahaan secara positif. Hasil penelitian Rimardhani, dkk., (2016) menunjukkan bahwa besar kecilnya dewan direksi mempengaruhi

keuntungan perusahaan secara positif. Hasil studi lain oleh Dharmastuti (2013) melaporkan bahwa proporsi dewan direksi mempengaruhi laba perusahaan secara positif.

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis keempat adalah:

**H<sub>4</sub> : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas**

### C. Kerangka Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**